

**KEBIJAKAN FORMULATIF KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**FEBBY NEVY NOVILIA**

**NIM. 105010101111090**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSIAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : KEBIJAKAN FORMULATIF KONSEP  
*RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**Identitas Penulis** :

a. Nama : Febby Nevy Novilia

b. NIM : 105010101111090

c. Konsentrasi : Hukum Pidana

**Jangka Waktu Penelitian** : 4 Bulan

**Disetujui Pada Tanggal** : 15 Januari 2014

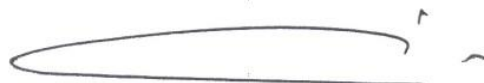
**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Bambang Sugiri, SH.MS.

NIP. 19570717 198403 1 002



Abdul Madjid, SH.MH.

NIP. 19590126 198701 1 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Eny Harjati, SH. M.Hum)

NIP. 19590406 198601 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN FORMULATIF KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**


Oleh :  
**FEBBY NEVY NOVILIA**  
**105010101111090**


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 18 Februari 2014


Ketua Majelis Penguji

Anggota

Anggota

  
Dr. Isman Navianto, SH. MH.  
NIP. 19550212 198503 1 003

  
Dr. Bambang Sugiri, SH. MS.  
NIP. 19570717 198403 1 002

  
Abdul Madjid, SH. MH.  
NIP. 19590126 198701 1 001

Anggota

Anggota

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

  
Paham Triyoso, SH. M. Hum.  
NIP. 19540517 198203 1 003

  
Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH.  
NIP. 19760429 200212 2 001

  
Eny Harjati, SH. M. Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya



Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

## **Kebijakan Formulatif Konsep *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Febby Nevy Novilia, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Abdul Madjid, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [veenevynovilia@gmail.com](mailto:veenevynovilia@gmail.com)

### **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulatif konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi logis dan interpretasi komparatif, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversi ini masih belum memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama (ideal) dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya. Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui Diversi di New Zealand dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana.

Kata Kunci : kebijakan formulatif, keadilan restoratif, diversi, sistem peradilan pidana anak

## **Formulatif Policy Concept Of Restorative Justice In Law Number 11 Year 2012 About The Juvenile Justice System**

Febby Nevy Novilia, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Abdul Madjid, SH.MH.

Law Faculty, Brawijaya of University

Email: [veenevynovilia@gmail.com](mailto:veenevynovilia@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This research aims to examine and analyze formulatif policy concept of restorative justice in law number 11 year 2012 about the juvenile justice system, as well as to review and analyze the suitability of restorative justice concepts in law number 11 year 2012 about the juvenile justice system with the concept of legal protection of the child. The research was carried out using the method of juridical normative approach to statute approach and comparative approach. The primary legal materials, secondary, tertiary and earned the author will be analyzed using the analysis technique of interpretation of law, i.e. grammatical interpretation, logical interpretation and comparative interpretation, which made reference in resolving legal issues that become the objects of study. Of research results with the method above, the author answers to existing problems that the implementation of the concept of restorative justice through this diversion is still not providing support to the process of protection of children who are dealing with the law. This is because the main principle (ideal) of diversion and restorative justice was the perpetrator of crime raises from the formal criminal justice system and provides the opportunity for alternative sanctions runs perpetrators without imprisonment has not fulfilled completely. The implementation of the concept of restorative justice through Diversion in New Zealand can be a picture of the success of the implementation of the functions of law enforcement agencies in dealing with the problems of children involved in the criminal case.

*Keywords: formulatif policy, restorative justice, diversion, juvenile justice system*

## A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut meminta

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tidak hanya itu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai pada publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Masih teringat pada 2005-2006, perhatian publik disedot terhadap permasalahan seorang anak SD dari Langkat, Sumatera Utara yang harus berkali-kali mengikuti persidangan akibat ulahnya memukul teman sekolahnya. Kasus ini begitu menyedot perhatian publik yang mempertanyakan, layakkah seorang anak 8 tahun dihadapkan dimuka pengadilan?.<sup>1</sup>

Kasus terbaru mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun ini yang sangat menjadi perhatian publik adalah kasus kecelakaan yang melibatkan putra musisi Ahmad Dhani, Abdul Qadir Jaelani (AQJ) yang masih berusia 13 tahun, AQJ yang mengendarai mobil sedan Mitsubishi bernomor polisi B-80-SAL, terlibat kecelakaan dengan dua mobil pada Minggu, 8 September 2013 dini hari. Kecelakaan itu menyebabkan enam orang meninggal dunia dan sembilan orang terluka. Kini Kepolisian Indonesia telah menetapkan AQJ sebagai tersangka dalam kecelakaan mobil tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> **Anak Ahmad Dhani Terlibat Kecelakaan Maut di Tol Jagorawi** (online), <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/08/0806475/Anak.Ahmad.Dhani.Terlibat.Kecelakaan.Maut.di.Tol.Jagorawi>, diakses pada 6 Desember 2013, pukul 09.54 WIB.

Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.

Atas dasar itu, lahirlah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah disahkan dan diundangkan menjadi salah satu produk legislasi DPR RI dan Pemerintah Tahun 2012. Sebagaimana kita ketahui, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan menjadi dasar hukum untuk mengkriminalisasi perbuatan nakal anak, sehingga memang sudah selayaknya diganti. Di dalam UU tersebut diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan *Restorative Justice System*. Yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

Namun jika dikaji secara mendalam mengenai konsep *restorative justice* melalui diversi, ide diversi yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal tersebut bertolak belakang dengan tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan belum mencerminkan keadilan restoratif yang sepenuhnya. Hal ini dikarenakan:<sup>3</sup>

- a. Diversi dilakukan dalam setiap tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan sehingga diversi tidak mampu menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses formal peradilan pidana.

---

<sup>3</sup> Muhammad Aenur Rosyid, **Alternatif Model Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing** (online), [http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/09/375\\_JURNAL-AENUR.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/09/375_JURNAL-AENUR.pdf), diakses 25 September 2013, pukul 19.45 WIB.

- b. Diversi yang disediakan hanya satu model saja tanpa menyesuaikan tingkat keseriusan tindak pidana.
- c. Diversi yang dijalankan cenderung memakan proses yang lama dan memakan biaya yang banyak.

Ide konsep *restorative justice* melalui diversi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berasal dari *The Beijing Rules*, yang kemudian menjadi suatu pembaharuan hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dilakukan tidak terlepas dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Di dalam melakukan pembaharuan hukum seyogyanya memperhatikan hasil kajian perbandingan. Dengan melakukan studi perbandingan maka akan diketahui bagaimana formulasi di negara-negara asing dan sebagai hal yang wajar jika kita melakukan penyesuaian (adaptasi) dengan negara-negara lain. Negara-negara lain yang telah mengimplementasikan konsep *restorative justice* ke dalam bentuk diversi dalam peradilan anak antara lain, seperti Australia, Jepang, Israel, Belanda, China, Amerika Serikat, dan New Zealand.

Uraian secara ringkas mengenai implementasikan konsep *restorative justice* melalui Diversi dapat diambil contoh dari bentuk pelaksanaan Diversi di New Zealand yang menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah diversi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989. Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi. Restrukturisasi Peradilan Pidana di New Zealand setelah reformasi hukum menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana.



Dari latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai konsep *restorative justice* melalui diversifikasi sebagai pembaruan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Kebijakan Formulasif Konsep *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

## **B. Masalah/Isu Hukum**

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Formulasif konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak?

## **C. Pembahasan**

Jenis penelitian pada penulisan karya tulis ini adalah yuridis normatif atau dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) , yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dikaji peraturan perundang-undangan No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan beberapa ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari

sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan hukum mengenai konsep *restorative justice* melalui diversi antara sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan sistem hukum yang berlaku di negara Asing (New Zealand). Jenis dan Sumber Bahan Hukum pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan kemudian oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi logis dan interpretasi komparatif, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa:

1. Kebijakan Formulatif konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - a. Konsep *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konsep *restorative justice* sebagai pembaruan sistem peradilan pidana anak harus sesuai secara substansial dengan formulasi konvensi internasional yang pengejawantahan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak yang adil merupakan perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Perlindungan terhadap anak merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Ide mengenai *restorative justice* masuk dalam pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi ayat (2):

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ditegaskan pada ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi.

Konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan (diaplikasikan) pada semua proses dan tahapan peradilan pidana, yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.<sup>4</sup>

a) Di Bidang Penyidikan

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Penjelasan Umum menyebutkan bahwa: Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 75.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) secara jelas penyidik wajib mengupayakan diversi. Namun dalam hal demikian penyidik tetap mengupayakan diskresi terlebih dulu, sebab kewenangan diskresi tertuang dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Penjelasan Umum menyebutkan bahwa: Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), Penyidik mempunyai hak melakukan diversi. Lebih lanjut Pasal 29 menerangkan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4):

- 1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversi.
- 3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Adapun dapat diuraikan secara singkat mengenai Tahap Penyidikan dalam Diversi, yaitu Penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan memungkinkan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan

apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversi. Di dalam penuntutan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversi. Sebagaimana di negara-negara lain ide diversi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan ide diversi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan.

b) Di Bidang Penuntutan

Diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) wajib diupayakan diversi sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri, sedangkan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi menurut ayat (2) adalah:

1. Tindak pidana yang ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi yang prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi kejaksaan negeri, lebih lanjut Pasal 42 menerangkan sebagai berikut:

Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (3):

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik;
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- 3) Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi.

Adapun dapat diuraikan secara singkat mengenai Tahap Penuntutan dalam Diversi, yaitu Penuntut umum anak setelah menerima limpahan ide diversi dari penyidik untuk segera ditentukan, apakah akan dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Jika berdasarkan musyawarah, setuju dilakukan diversi, maka penuntut umum memasukkan anak nakal tersebut pada program diversi. Sebaliknya jika tidak dilakukan diversi maka segera perkara dilimpahkan ke pengadilan anak.

#### c) Di Bidang Persidangan

Anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakili advokat, didampingi petugas kemasyarakatan dari Bapas dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya, sehingga terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sedapat mungkin anak dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan kepada penjahat dewasa.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian Kemasyarakatan, dan apabila laporan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan, menurut ayat (4) putusannya batal demi hukum, Pasal 61 dan Pasal 62, pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Serta merta pengadilan wajib memberikan petikannya pada anak atau advokatnya, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pembacaan putusan,

---

<sup>5</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, **Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*)**, Kumpulan Tulisan, Jakarta, 2005, hlm. 212.

pengadilan wajib memberikan salinannya kepada anak atau advokatnya, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

Adapun dapat diuraikan secara singkat mengenai Pemeriksaan Pengadilan dalam Diversi, yaitu Hakim anak menerima pelimpahan perkara anak dari penuntut umum anak untuk segera dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Pihak pengadilan setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum anak, maka segera melakukan pemeriksaan perkara anak nakal tersebut. Hakim dapat menentukan apakah akan dilakukan diversi atau perkara akan diputus pidana. Jika menentukan dilakukan diversi, maka ditentukan program diversi yang tepat bagi anak tersebut, dan perkara dihentikan. Jika hakim menentukan akan diperiksa sampai akhir maka terhadap anak nakal ditentukan putusan yang tepat bagi anak tersebut sesuai dengan perbuatan dan keadaan anak nakal yang bersangkutan.

Selanjutnya Tahap Pelaksanaan Putusan dalam Diversi, yaitu Pihak pembina lembaga pemasyarakatan anak dapat menentukan apakah anak nakal yang telah diputus hakim, akan dibina di LP Anak atau dengan pelaksanaan program diversi. Saat ini telah terjadi kerjasama antara pihak Pembina LP Anak dengan Departemen Sosial, dimana telah disepakati bahwa Panti-panti Bina Remaja dapat sebagai tempat pembinaan anak nakal, sekaligus anak pidana. Dengan demikian sebenarnya anak pidana ataupun anak didik LP Anak tidak harus menjalani pembinaan di dalam LP Anak.

d) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penjelasan Umum, penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (sebagai pengganti LAPAS Anak). Pasal 63 menyebutkan bahwa petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing kemasyarakatan;
- b. Pekerja sosial profesional; dan
- c. Tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 65 huruf d menyebutkan bahwa Anak di bawah bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Pasal 1 angka 24, BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan pada semua proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, Persidangan hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hal diatas tentu sangat bertolak belakang dengan tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan belum mencerminkan keadilan restoratif yang sepenuhnya (idealnya).

Adapun tujuan peradilan pidana anak dengan Keadilan Restoratif, diantaranya:<sup>6</sup>

- 1) Mengupayakan perdamaian antara koban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- 3) Menjauhkan anak di pengaruh negatif proses peradilan;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan

---

<sup>6</sup> Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.



prinsip utama (ideal) dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya.

b. Bentuk Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui Diversifikasi Berdasarkan Kajian Komparasi di New Zealand

Studi komparasi diperlukan dalam pembaruan hukum, karena kajian perbandingan hukum untuk memahami bagaimana perkembangan hukum di negara-negara lain sekaligus pembaruan hukum yang kita lakukan terdapat kewajiban untuk menyesuaikan (adaptasi) dengan perkembangan negara-negara lain pada umumnya.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui Diversifikasi di New Zealand dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah diversifikasi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989. Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi. Restrukturisasi Peradilan Pidana di New Zealand setelah reformasi hukum menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana.

c. Kebijakan Formulasif Konsep Restorative Justice melalui *Family Group Conferencing*

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. *Conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti

anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar negeri dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa.

Oleh karena pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan pada semua proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, Persidangan hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Penulis berpendapat bahwa alangkah baiknya konsep *restorative justice* melalui diversi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dikeluarkan dari setiap proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana agar upaya menjauhkan dan menghindarkan stigmatisasi Anak dapat tercapai.

Hal yang paling penting adalah mengenai tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu untuk memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan prinsip utama (ideal) dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari system peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara dapat terpenuhi sepenuhnya.

*Family Group Conferencing* sebagai variasi bentuk *restorative justice* yang dikembangkan dan diterapkan di Negara New Zealand merupakan alternatif kebijakan formulatif dalam penanganan dan perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Lebih dari itu, *family group conferencing* dapat menjadi gambaran dan sekaligus sebagai masukan

pembaharuan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mendatang (*Ius Constituendum*).

2. Ketidaksesuaian konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 64 yang menguraikan tentang salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan anak, hal ini tampak tidak sejalan dengan pelaksanaan program konsep *restorative justice* melalui diversi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Harapan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan dan anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar tidak akan berhasil karena dengan dilakukannya Diversi pada setiap tahap proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap Anak, perampasan kemerdekaan dan Anak sulit untuk dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar terkait dengan labelisasi yang telah melekat pada dirinya.

Demikian pula dengan usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana dan perlindungan hukum bagi anak baik kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis tidak tercapai dengan adanya proses Diversi pada setiap tahapan/tingkatan Sistem Peradilan Pidana yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian terhadap 2 (dua) pokok permasalahan di atas, diuraikan di bawah ini:

- 1) Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan pada semua proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana yaitu mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, Persidangan hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini masih belum memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama (ideal) dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya.
- 2) Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui Diversi di New Zealand dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana.

### 2. Saran

Demi mewujudkan pembaharuan kebijakan formulasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mendatang yang lebih baik, disarankan sebagai berikut:

Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan:

- a. Alangkah baiknya konsep *restorative justice* melalui diversi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dikeluarkan dari setiap proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana agar upaya menjauhkan dan menghindarkan stigmatisasi Anak serta penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai/terwujud.
- b. *Family Group Conferencing* sebagai variasi bentuk *restorative justice* yang dikembangkan dan diterapkan di Negara New Zealand dapat menjadi gambaran dan sekaligus sebagai masukan pembaharuan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mendatang (*Ius Constituendum*).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Jakarta, 2009.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, **Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*)**, Kumpulan Tulisan, Jakarta, 2005.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

### INTERNET

**Anak Ahmad Dhani Terlibat Kecelakaan Maut di Tol Jagorawi** (*online*), <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/08/0806475/Anak.Ahmad.Dhani.Terlibat.Kecelakaan.Maut.di.Tol.Jagorawi>, diakses pada 6 Desember 2013, pukul 09.54 WIB.

Muhammad Aenur Rosyid, **Alternatif Model Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing** (*online*), [http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/09/375\\_JURNAL-AENUR.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/09/375_JURNAL-AENUR.pdf), diakses pada 25 September 2013, pukul 19.45 WIB.